

Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa melalui Pendekatan Collaborative Governance

Rendi Priono¹⁾, Rafly Ramadan²⁾, Juliardi Dwi Anggoro³⁾

^{1,2,3)}[Program Sudi Ilmu Pemerintahan, FISIP, Universitas Muhammadiyah Buton]

^{1,2,3)}Batupoar, Jl. Betoambari No.36, Lanto, Kota Bau-Bau, Sulawesi Tenggara 93724

Email : rendipriyono123@gmail.com¹⁾, raflyramadan021201@gmail.com²⁾, keianggoro@gmail.com³⁾

ABSTRACT

The aim of this study was to determine the management of village-owned enterprises through a collaborative governance approach at the village-owned enterprises of Wasuni Mainawa, the village of Suka Maju, the village of Wolowa, the regency of Buton. Qualitative methods can be used to reveal and understand something behind a phenomenon that is not even minimally known. The results of the study show: 1) The face-to-face dialogue has been carried out more than once, which has the character of formal and non-formal. Each phase of the development of BUMDesa is inseparable from the presence of face-to-face dialogue that can improve communication by facilitating the cultivation of trust, the conduct of negotiations and the achievement of the desired results. 2) The building of trust is formed when a face-to-face dialogue takes place, that is, by building a good image, understanding information, potential, opportunities and seriousness in carrying out the collaboration. 3) Process engagement is carried out during face-to-face dialogue inspiring stakeholder engagement, providing motivation and mutual understanding. 4) Sharing Understanding (Sharing Understanding) collaboratively in developing BUMDes was done well with understanding common goals. 5) The interim results of the BUMDesa development program were found to be able to meet the needs of the community
Keywords : Management, BUMDes, Collaborative Governance

I. PENDAHULUAN

Pemerintah desa memiliki peran yang signifikan dalam pengelolaan proses sosial dalam kehidupan, dengan tugas utama yang harus diemban adalah bagaimana menciptakan kehidupan demokrasi dan memberikan pelayanan sosial yang baik, sehingga dapat membawa warganya pada kehidupan yang sejahtera, tentram, aman, dan berkeadilan (Solekhan, 2014). Desa merupakan unsur pelaksanaan pemerintahan terbawah yang secara konstitusi telah diatur dalam Undang - Undang Desa No 6 tahun 2014. Undang-Undang ini turut mengatur tentang pendirian dan pelaksanaan usaha-usaha tertentu oleh desa dalam mendukung kemandirian dan kemajuan desa itu sendiri. Proses dan upaya untuk mewujudkan kemajuan pembangunan desa dapat dilakukan dengan berbagai upaya, salah satunya yakni dengan pendirian unit usaha yang disesuaikan dengan kondisi dan potensi dari desa itu sendiri.

Salah satunya yaitu dengan melalui lembaga ekonomi ditataran Desa yaitu Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa). BUMDesa memiliki peran sebagai piranti pengembangan otonomi desa dan juga upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, Desa diharapkan mampu mengoptimalkan potensi desanya sesuai dengan kondisi, kemampuan, dan kearifan lokal desa. sedangkan sebagai lembaga yang berupaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, BUMDesa dalam pengelolaannya melibatkan partisipasi masyarakat yang harapannya dapat mendorong

perekonomian masyarakat Desa dan mengurangi jumlah pengangguran di Desa (Solekhan, 2014).

Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) dilakukan oleh Pemerintah Desa bersama dengan masyarakat. Pengelolaan yang melibatkan masyarakat secara langsung diharapkan mampu untuk mendorong perekonomian dengan memberdayakan masyarakat. Keterlibatan masyarakat dimulai sejak awal pendirian sampai dengan pengelolaan lembaga tersebut. Perbedaan BUMDesa apabila dibandingkan dengan lembaga ekonomi lainnya yakni permodalan BUMDesa diatur dalam kebijakan, bahwa setidaknya dalam permodalan BUMDesa sendiri memiliki komposisi modal 51% dan 49% dapat dimiliki oleh publik atau masyarakat.

Desa Suka Maju, Kecamatan Wolowa merupakan salah satu Desa yang cukup sukses dalam pengembangan dan pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa). Badan Usaha Milik Desa yang terdapat di Desa Wolowa adalah Badan Usaha Milik Desa "Wasuni Mainawa. Permasalahan pertama pada BUMDesa di desa Suka Maju adalah inventarisasi aset. Dalam pengelolaan Bumdes Wasuni Mainawal, orientasi keuntungan bukan hanya merujuk pada keuntungan nominal, tetapi juga berupa keuntungan aset. Sudah cukup banyak instrument pendukung BUMDesa yang telah menjadi aset Bumdes itu sendiri.

Permasalahan selanjutnya adalah sinkronisasi unit usaha ke induk Bumdes. Sebelum Bumdes wasuni mainawa berdiri di desa Suka Maju, unit-unit usaha ini berdiri sendiri dan menjadi bagian dari Lembaga Desa

Wisata. Dengan kehadiran BUMDesa di Desa Suka Maju, unit-unit usaha tersebut diharapkan untuk beralih menjadi bagian dari BUMDesa. Yang menjadi permasalahan terhadap situasi ini adalah sulitnya untuk memberikan pemahaman kepada para pelaku unit usaha untuk bergeser menjadi bagian dari BUMDesa. Persoalan yang dipermasalahkan oleh pelaku unit usaha adalah, jika harus bergeser ke bawah payung BUMDesa, artinya bahwa harus ada regulasi dan aturan baru yang harus dipahami dan dilaksanakan.

Penelitian ini dilakukan dengan adalah Untuk mengetahui Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa Melalui Pendekatan Collaborative Governance Pada Badan Usaha Milik Desa Wasuni Mainawa Desa Suka Maju Kelurahan Wolowa Kabupaten Buton

II. METODE

Penelitian kualitatif yang terpenting adalah bagaimana menentukan informan kunci yang sarat informasi sesuai dengan fokus penelitian (Sugiyono, 2020). Metode kualitatif dapat digunakan untuk mengungkap dan memahami sesuatu dibalik fenomena yang sedikitpun belum diketahui. Metode ini dapat juga digunakan untuk mendapatkan wawasan tentang sesuatu yang baru sedikit diketahui, serta dapat membantu peneliti memberi rincian yang kompleks tentang fenomena yang sulit diungkapkan oleh metode kuantitatif. Format deskriptif kualitatif bertujuan untuk menggambarkan, meringkaskan berbagai kondisi, situasi atau berbagai fenomena realitas sosial yang ada di masyarakat yang menjadi objek penelitian dan berupaya menarik realitas itu ke permukaan sebagai suatu ciri, karakter, sifat, model, tanda atau gambaran tentang kondisi, situasi, ataupun fenomena tertentu.

III. PEMBAHASAN

Collaborative governance yang dilakukan oleh Pemerintah Desa Suka maju dengan berbagai elemen seperti badan usaha, dan swasta (*privat sector*) yang melibatkan masyarakat (*civil society*). Alasan munculnya kolaborasi tersebut adalah karena ketidakmampuan Pemerintah Desa Suka Maju untuk mengatasi permasalahan pembangunan desa yang menyangkut isu sosial ekonomi masyarakat. Selain itu, biaya yang tinggi yang turut menjadi masalah dalam menjalankan pengelolaan BUMDes milik Desa Suka Maju Kabupaten Buton adalah tidak adanya sumber daya modal. Sehingga ada dorongan untuk melakukan kolaborasi baik dengan pemerintah, masyarakat, maupun swasta dalam rangka mengatasi isu sosial ekonomi terkait dampak sosial ekonomi di masyarakat. Hasil penelitian terkait *collaborative governance* dalam pengembangan BUMDesa di Desa Suka Maju yang telah diuraikan di atas, selanjutnya akan dibahas dengan menggunakan kelima indikator proses *collaborative governance* oleh Ansell dan Gash (2007) yaitu *face to face dialogue*, *trust building*, *commitment to the process*, *share understanding*, dan *intermediate outcomes*. Adapun uraiannya sebagai berikut :

Face to Face Dialogue (Dialog Tatap Muka)

Menurut Suryati dkk, (2018) bahwa *face to face dialogue* dapat dilakukan melalui pertemuan formal dan non formal. Hal ini sama halnya dengan *collaborative governance* dalam pengembangan BUMDes. Proses *face to face dialogue* atau dialog tatap muka yang dilakukan oleh para stakeholders berupa pertemuan formal dan non formal. Pertemuan formal meliputi kegiatan dialog tatap muka melalui musyawarah desa dan pelatihan-pelatihan. Sedangkan pertemuan non formal meliputi kegiatan-kegiatan pembangunan pengadaan dan instalasi kandang dan koordinasi langsung. Tahapan pengembangan BUMDes tidak lepas dengan adanya musyawarah desa.

Selain adanya dialog tatap muka yang dilakukan, komunikasi secara formal maupun non formal dalam *collaborative governance*, para stakeholder juga memanfaatkan adanya teknologi informasi. Para stakeholder melakukan komunikasi langsung tanpa tatap muka dengan memanfaatkan *smartphone* untuk melakukan koordinasi dan pengawasan pelaksanaan pengembangan BUMDes. Keberadaan teknologi informasi dapat membantu stakeholders untuk meningkatkan komunikasi, memantau kondisi BUMDes, dan membantu mempercepat pengambilan keputusan yang sifatnya urgent. Sebagaimana disampaikan dalam penelitian Cabral dan Krane (2018), bahwa keberadaan *non face to face dialogue* juga penting dalam menjalankan kolaborasi.

Trust Building (Membangun Kepercayaan)

Menurut Ansell dan Gash (2007), kolaborasi bukan semata tentang negosiasi antar stakeholder, kolaborasi merupakan upaya untuk saling membangun kepercayaan satu sama lain. Kepercayaan dapat dibentuk dari musyawarah desa yang dilakukan. Adanya kegiatan musyawarah desa untuk membangun kepercayaan dilakukan dengan membangun citra yang baik dengan para stakeholder.

Dalam hal ini Pemerintah Desa Suka Maju berupaya mendekati masyarakat dan memberikan pemahaman terkait keberadaan pihak luar demi kemajuan Desa Suka maju. Kekuasaan dapat digunakan untuk memajukan upaya bersama dari para kolaborator, menghasilkan keuntungan bersama, atau untuk memberdayakan orang lain untuk berpartisipasi secara lebih efektif (Imron, 2020). Dalam dialog tersebut, masing-masing stakeholder mampu memahami satu sama lain melalui informasi-informasi yang disampaikan sehingga memudahkan stakeholders membentuk suatu jaringan (*networks*) yang kuat. Ketika *networks* sudah dibangun, tantangan selanjutnya yang harus dipikirkan adalah bagaimana strategi dalam mengelola *networks* tersebut (Ma'rif dan Isbandono, 2016).

Upaya membangun kepercayaan dilakukan dengan memperbanyak komunikasi, melakukan transparansi laporan, menjalankan komitmen yang telah dibuat, dan memberi pemahaman kepada stakeholders lainnya terkait tujuan program yang akan diterapkan di Desa Suka

Maju. Untuk menghindari adanya ego dari masing-masing kepentingan pelaku kolaborasi, stakeholders telah berupaya untuk melakukan koordinasi di awal. Sehingga masing-masing stakeholders mampu berupaya untuk saling melengkapi kebutuhan dalam pengembangan BUMDes Wasuni Mainawa. Selain itu, sikap optimis dari stakeholder juga akan membantu meningkatkan kepercayaan. Optimisme tersebut juga didukung potensi yang dimiliki Desa Suka Maju seperti lingkungan wilayah desa

Commitment to The Process (Komitmen terhadap Proses)

Komitmen tentunya memiliki relasi yang kuat dalam proses kolaborasi. Ansell dan Gash (2007) menyimpulkan dari beberapa studi kasus bahwa tingkat komitmen antar stakeholder merupakan penentu dari keberhasilan atau kegagalan dari sebuah collaborative governance. Komitmen yang kuat merupakan motivasi untuk terlibat atau berpartisipasi dalam collaborative governance. Pelaksanaan commitment to the process dalam collaborative governance pengembangan BUMDes sudah berjalan dengan baik. Komitmen dibentuk ketika berlangsungnya face to face dialogue khususnya ketika musyawarah desa. Peran-peran tersebut terbagi atas peranan untuk menyediakan dana/anggaran pengembangan BUMDes, pendampingan, memberikan motivasi, serta memberikan pelatihan-pelatihan. Komitmen stakeholders sudah dilakukan dengan baik, meskipun masih ada yang belum maksimal. Hal ini seperti yang terlihat pada peran dari Dinas Pariwisata yang berkomitmen untuk menjadikan BUMDesa Wasuni Mainawa sebagai lokasi wisata edukasi belum dilakukan lantaran adanya kendala yang dihadapi. Keberadaan Pemerintah Desa Suka Maju yang akan bertanggungjawab terkait keberlangsungan BUMDes telah dipertimbangkan di awal, tanpa adanya aktor yang bertanggungjawab dapat mengakibatkan proses manajemen berhenti, sehingga peran Pemerintah Desa lebih banyak terlihat di akhir program pengembangan BUMDes.

Share Understanding (Berbagi Pemahaman)

Saling berbagi pemahaman dapat berimplikasi terhadap kesepakatan bersama untuk memaknai suatu masalah. Berbagi Pemahaman dalam collaborative governance pengembangan BUMDesa di Suka Maju sudah berjalan dengan baik. Stakeholders yang terlibat sudah memahami peran masing-masing. Hal ini dibuktikan dengan adanya pemahaman bersama terkait tujuan dibangunnya kolaborasi pengembangan BUMDes.

Dari adanya dialog tatap muka lebih mudah melakukan komunikasi antar stakeholders, saling melengkapi kekurangan yang dibutuhkan, menyampaikan ide gagasan, dan menyampaikan masalah yang dihadapi dalam forum sehingga masalah dapat dipecahkan bersama-sama. Seperti disampaikan oleh Imron (2020) bahwa kesadaran akan saling

membutuhkan dan saling terbuka dalam merefleksikan aspirasinya menjadi modal awal kerjasama kolaboratif yang dilakukan. Sama halnya dengan masalah pembagian keuntungan dari pengembangan BUMDes. Jika tidak ada dialog tatap muka dan pemahaman bersama, maka akan rentan terjadi kesalahpahaman, perselisihan, dan konflik. Pembagian keuntungan memang seharusnya di atur dalam tata aturan yang jelas. Pembagian keuntungan BUMDes diatur di dalam AD/ART BUMDes.

Intermediated Outcomes (Hasil Sementara)

Hasil *intermediate outcomes* muncul apabila tujuan dan memberikan keuntungan yang relatif kongkrit serta “*small wins*” dari suatu kolaborasi dapat dimungkinkan terjadi. *Intermediate outcomes* digunakan tolok ukur untuk menentukan keberlanjutan kolaborasi hingga mencapai final outcomes. *Intermediate outcomes* dari collaborative governance pengembangan BUMDes di Desa Suka Maju Kabupaten Buton yaitu sudah cukup sesuai dengan tujuan yang telah disepakati di awal. Tujuan kolaborasi pengembangan BUMDes adalah untuk meningkatkan mata pencaharian masyarakat yang berbasis potensi lokal melalui optimalisasi BUMDes sudah terwujud, meskipun manfaatnya belum dirasakan secara luas oleh masyarakat Desa Suka Maju. Kehadiran BUMDes sebagai mata pencaharian peternak dan petani belum dapat dirasakan oleh masyarakat luas. Namun, manfaat hasil dari BUM Desa sudah dirasakan oleh masyarakat. Hasil collaborative governance pengembangan BUMDesa Wasuni Mainawa yaitu mendukung program pemerintah Kabupaten Buton. Hasil capaian lainnya yaitu Desa Bandungrejo ditetapkan sebagai pilot project dalam pembangunan kawasan ekonomi pedesaan.

IV. KESIMPULAN

Berdasarkan analisis terhadap collaborative governance dalam pengembangan BUM Des Wasuni Mainawa di Desa Suka Maju Kabupaten Buton, pelaksanaan collaborative governance tersebut sudah berjalan dengan baik, dengan upaya dan keberhasilan yang telah dilakukan dan dicapai oleh BUM Desa Wasuni Mainawa sebagai berikut :

Face to face dialogue (Dialog tatap muka) telah dilakukan lebih dari satu kali, yang bersifat formal maupun non formal. Setiap tahapan pengembangan BUMDesa tidak lepas dari adanya *face to face dialogue* yang mampu meningkatkan komunikasi sehingga memudahkan untuk menumbuhkan kepercayaan, melakukan negosiasi dan mencapai hasil yang diinginkan. Selain itu, keberadaan teknologi informasi juga membantu jalannya kolaborasi pengembangan BUMDes artinya keberadaan *non face to face dialogue* juga diperlukan.

Trust building (Membangun kepercayaan) dibentuk ketika face to face dialogue dilakukan, yakni dengan membangun citra yang baik, memahami informasi-

informasi, potensi, peluang, dan keseriusan menjalankan kolaborasi. Kepercayaan antar stakeholders sudah terbentuk dari motivasi yang tinggi terhadap kolaborasi, dan saling percaya antar stakeholders.

Commitment to the process (Komitmen terhadap proses) dilakukan ketika *face to face dialogue* dengan menggugah komitmen stakeholders, saling memberikan motivasi, dan saling memahami bersama. Komitmen para stakeholder sudah dilakukan sesuai perannya masing-masing, dan masih terdapat peran yang kurang maksimal.

Share understanding (Berbagi Pemahaman) dalam kolaborasi pengembangan BUMDes sudah dilakukan dengan baik dengan pemahaman tujuan bersama, pemahaman peran masing-masing stakeholders, dan pembagian hasil keuntungan BUM Desa yang diberikan keseluruhannya kepada BUMDes. Pemahaman bersama dilakukan selama *face to face dialogue* sehingga komunikasi antar stakeholders terjalin dengan baik.

Intermediate outcomes (Hasil sementara) dari program pengembangan BUMDesa yaitu hasil yang mampu memenuhi kebutuhan masyarakat. Hasil yang telah dicapai oleh BUMDes Wasuni Mainawa, yakni mendukung program Pemerintah Daerah, ditetapkannya sebagai pilot project pembangunan kawasan pedesaan, menjadi benchmarking pengelolaan BUMDesa di desa lain, dan upaya pengembangan volume usaha.

Sugiono. (2012). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung : Alfabeta.

DAFTAR PUSTAKA

Adawiyah, Robiatul. 2018. Strategi Pengembangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Berbasis Aspek Modal Sosial (Studi pada BUMDes Surya Sejahtera, Desa Kedungturi, Kecamatan Taman, Kabupaten Sidoarjo). *Jurnal Kebijakan dan Manajemen Publik*, September – Desember 2018 Volume 6, Nomor 3, Universitas Airlangga Surabaya.

Ansell, Chris. & Gash, Alison. 2007. Collaborative Governance in Theory. *Journal of Public Administration Research and Theory Advance Access published November 13*.

Cabral, Sandro. dan Krane, Dale. (2018). *Civic Festivals and Collaborative Governance*. Intern

Imron, Muhammad. (2020). Kolaborasi Quadruple Helix dalam Menciptakan Inovasi Konsep Wisata Edukasi Kampung Nanas di Desa Palaan. *Journal of Public Sector Innovations*, Vol. 4, No. 2, Mei, Hal. 68 – 74

Ma'ruf, Muhammad Farid. & Isbandono, Prasetyo. (2016). Urgensi Kerjasama Antar Daerah (Intergovernmental) dalam Penanganan Bencana Alam di Daerah. *Journal of Public Sector Inovation* Vol.1 No. 1. November, Hal. 47 – 54.